

PIDATO ILMIAH
REFLEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI INDONESIA



MOHAMMMAD KUS YUNANTO, S.I.P., MPA
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIES NATALIS KE -38

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"
YAYASAN NOTOKUSUMO
YOGYAKARTA
JUM'AT, 16 JUNI 2017

Al

Bismillahirrahmaanirahiim
PIDATO ILMIAH DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-38
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"
YAYASAN NOTOKUSUMO
YOGYAKARTA
JUM'AT, 16 JUNI 2017

OLEH :
MOHAMMAD KUS YUNANTO, S.I.P., MPA

JUDUL:
**REFLEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

*Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Notokusumo beserta jajarannya;
Yang kami hormati Direktur Akper Notokusumo beserta jajarannya;
Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" beserta
wakil ketua;
Segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN"
Yogyakarta;
Dosen, Karyawan dan Mahasiswa yang kami banggakan, serta hadirin semua
yang kami-hormati.*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan banyak limpahan kenikmatan, antara lain kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri acara puncak Dies Natalis Ke 38 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta. Sholawat dan salam kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu'alaihiwassalam, keluarganya, sahabatnya, tabi'it, tabi'in, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul "REFLEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA". Sebelum kami menyampaikan orasi ilmiah pada kali ini, ijin kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang bertaqwa. Amin Yarobbal'alamin.

Hadirin yang saya hormati,

Fenomena kemiskinan selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari forum-forum diskusi, seminar, *talk show*, dengan tawaran gagasan dari berbagai kalangan, baik para akademisi, pakar, praktisi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Berbagai teori, konsep dan pendekatan dikembangkan, dirumuskan untuk menyibak tirai misteri kemiskinan. Namun sampai saat ini, persoalan kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita, namun gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kondisi ini merupakan sebuah persoalan yang mengandung banyak dimensi yang menuntut pemecahannya melalui berbagai pendekatan. Karena itu, setiap upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa konsep kemiskinan bukan dalam pengertian sempit bahwa problema kemiskinan semata-mata karena faktor ekonomi, melainkan dimensi sosial, budaya, juga politik sebagai sumber kemiskinan.

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggungjawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau *stakeholder* untuk mengatasi persoalan besar ini.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde Baru maupun pada Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap masalah ini, faktanya berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun sampai sekarang, kemiskinan tetap ada.

Hadirin yang saya hormati,

Kemiskinan tidak hanya mencakup persoalan materi saja, namun juga masalah-masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang multidimensi, maka kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun definisi kemiskinan dari beberapa dimensi, dikemukakan oleh Nugroho dalam Sunartiningsih (2004:80) di bawah ini:

1. Kemiskinan berdimensi Ekonomi

- Kemiskinan Absolut, suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau sekelompok orang masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- Kemiskinan Relatif, mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, namun secara relatif pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitarnya.

2. Kemiskinan berdimensi Sosial-Budaya

- Kemiskinan Kultural, suatu kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, fatalistik, dan sebagainya.

3. Kemiskinan berdimensi Struktural atau Politik

- Kemiskinan Struktural atau Politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber awal masalah kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain. Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset khususnya faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang rendah serta kemampuan yang rendah dalam merespon peluang ekonomi. Ketidakberdayaan ranah politik dapat dilihat dari kecilnya akses dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya posisi tawar dalam membela hak politik sehingga terjadi diskriminasi. Sementara ketidakberdayaan secara sosial ditandai dengan rendahnya akses terhadap informasi dan pelayanan sosial, lemahnya interaksi sosial sehingga masyarakat menjadi termarjinalkan. Kemudian ketidakberdayaan kultural ditandai dengan lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai kultural terhadap usaha peningkatan kondisi kehidupan.

Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin akan dihindangi rasa malas, apatis, memiliki sikap *dependency* atau ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemandirian untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih baik.

Hadirin yang saya hormati,

Selama ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan kemiskinan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 834-835) bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu:

1. Program penganggulangan kemiskinan selama ini lebih cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin, pemberian beras miskin, serta bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah, tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan, justru memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, menjadikan mereka selalu bergantung baik budi pemerintah tanpa harus bekerja keras untuk merubah nasib. Masyarakat akan terkena virus penyakit psikososial yaitu malas bekerja, fatalistik, manja, dan rasa bergantung terhadap pemerintah cukup tinggi.

2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil *survey* sosial dan ekonomi nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran pra sejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya data dan informasi seperti tidak dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai Negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Ketidakberhasilan dalam pengentasan kemiskinan, selain disebabkan faktor bantuan sosial yang tidak mendidik masyarakat miskin, juga cara pemahaman yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik bahwa kemiskinan disebabkan sebuah kondisi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik masyarakat. Akibat dari pandangan itu, proyek

pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada perbaikan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Mengatasi kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masyarakat miskin seyogyanya diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumber-sumber daya yang dapat menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu, program bantuan seharusnya difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa anggungan pada masyarakat miskin, juga memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian. Dengan demikian, secara bertahap, masyarakat membebaskan diri dari ketergantungan kepada pemerintah.

Hadirin yang saya hormati,

Bicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa menggelisahkan pada era yang sudah semakin canggih, kemiskinan masih saja tetap dominan. Kemajuan jaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, disatu sisi hanyalah memberikan kontribusi kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk dunia, sementara di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih terbelenggu kemiskinan dari berbagai lini kehidupan.

Secara sosiologis sejarah menunjukkan bahwa pembangunan di Era Orde Baru, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, budaya, dan politik. Pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Kita tidak menafikan, pemerintah di rezim Orde Baru telah melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut seperti program jaringan pengamanan sosial (JPS) meliputi: program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra), serta Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Orientasi sasaran IDT, Takesra dan Kukesra adalah masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun sasaran program sama yaitu penduduk miskin, akan tetapi jika dilihat secara khusus terdapat perbedaan wilayah sasaran antara IDT, Takesra dan Kukesra. IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di desa-desa tertinggal, sedangkan Takesra dan Kukesra memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di luar lokasi desa tertinggal (Sulistiyani, 2004:8).

Kebijakan program pemerintah di Era Orde Baru dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal karena program tersebut selain tidak mampu memberikan *outcome* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pendekatan yang digunakan adalah *top-down* yang segalanya bersumber pada pemerintah. Dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan saja.

Pendekatan *top-down* yang sifatnya sentralistik, dimana segala kebijakan pemerintah sangatlah terpusat. Ketidakterdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta ketidakmampuan melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan program akan mematikan inisiatif dan kreatifitas masyarakat. Pendekatan ini juga tidak memperhatikan aspek sosial, budaya, perbedaan potensi wilayah baik secara geografis maupun demografis, kemampuan kualitas sumber daya manusia yang berbeda antara wilayah, yang pada akhirnya produk-produk pembangunan tidak mencapai sasaran sehingga program pembangunan hanya mubazir dan mengabaikan asas manfaat bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman program untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan pada zaman Orde Baru, pemerintah di rezim Reformasi, merumuskan berbagai kebijakan program bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Program-program bantuan tersebut seperti bantuan beras miskin dengan cara/model baru, bantuan langsung tunai dengan cara/model baru, pemberian bantuan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) dengan beasiswa untuk orang miskin, bantuan bibit dan pupuk gratis untuk masyarakat petani, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), program Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Alokasi Dana Desa (ADD), dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam pelaksanaan program-program tersebut di atas, pemerintah di rezim Reformasi menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan yang dianggap cukup ideal dalam pembangunan dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, aspirasi masyarakat, dan memposisikan masyarakat sebagai subyek atau aktor pembangunan. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat miskin harus berorientasi pada pemberdayaan.

Hadirin yang saya hormati,

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah rezim Reformasi dalam rangka pengetasan kemiskinan ternyata belum juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Meskipun harus diakui bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 % atau 37,2 juta orang pada tahun 2004 menjadi 11,37 % atau 28,07 juta orang pada tahun 2016. Penurunan angka kemiskinan antara lain didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 % pada tahun 2004 menjadi 5,92 % pada bulan maret di tahun 2016.

Secara kuantitas, pemerintah rezim Reformasi telah berhasil menurunkan jumlah angka kemiskinan, tetapi dari aspek kualitas (sosial, budaya, dan politik) masyarakat masih juga terbelenggu dari lingkaran kemiskinan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah rezim Reformasi dalam rangka pengetasan kemiskinan di Negeri ini pemahamannya masih juga menekankan pada satu aspek saja, yaitu masalah ekonomi (mengatasi persoalan materi atau modal) saja, dengan masih mengabaikan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya, dan politik yang pasti berpengaruh terhadap perilaku masyarakat miskin.

Bukti dari permasalahan tersebut diantaranya dapat kita lihat dari masih kurang aktifnya partisipasi masyarakat selama dan sesudah proses pemberdayaan berlangsung, masih kurang diperkenankannya oleh pihak-pihak tertentu di masyarakat terhadap partisipasi masyarakat selama dan sesudah proses pemberdayaan berlangsung, masih lemahnya motivasi dan kreativitas masyarakat selama dan sesudah proses pemberdayaan berlangsung, masih ketergantungannya masyarakat pada aktor atau pelaku pemberdayaan maupun pemerintah, pelaku utama pemberdayaan masih cenderung mengutamakan kepentingan administrasi daripada mengutamakan proses dengan segala tuntutanannya, serta terhentinya proses *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan. Bahkan, yang lebih menyayat hati adalah saat ini berbagai program pemberdayaan mulai dikurangi oleh pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat miskin mulai pasrah lagi terhadap kondisi kemiskinan yang dialaminya.

Hadirin yang saya hormati,

Sesungguhnya kemiskinan yang dialami masyarakat miskin saat ini bukan hanya melulu pada satu aspek saja, yaitu masalah ekonomi (persoalan materi atau modal) belaka, tetapi merupakan gabungan dari kemiskinan yang disebabkan oleh beragam aspek, bahkan mengarah pada persoalan hak dan ketidakadilan. Ketika individu/masyarakat miskin mengatakan bahwa kami tidak memiliki usaha atau kegiatan karena tidak mempunyai modal, maka arti modal itu menjadi luas tafsirannya. Modal yang tidak ada atau kurang bukan hanya berupa uang yang tidak ada atau kurang, melainkan kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat atau kurang diperankan oleh pihak-pihak tertentu di masyarakat (persoalan dari aspek sosial dan politik); juga karena kurang atau tidak punya akses pada sumber daya lokal, pada relasi orang perorang atau lembaga (lingkungan); juga karena lemahnya motivasi dan kreativitas sehingga menjadi tampak pasrah dan malas (persoalan budaya) karena dilatarbelakangi juga oleh tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga dapat pula dibenarkan bahwa kemiskinan yang tampak pada masyarakat miskin berupa wajah kemiskinan ekonomi/modal usaha dan disebabkan oleh mentalitas/etos kerja rendah, namun ternyata sangat berkaitan dengan dimensi lain.

Dawan Rahardjo dalam Jamasy (2014) dalam kesimpulannya tentang faktor penyebab kemiskinan di Indonesia saat ini, menyebutkan ada tujuh faktor penyebab kemiskinan yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni: *pertama*, kemiskinan disebabkan oleh kesempatan kerja (miskin) karena nganggur atau tidak mempunyai kesempatan kerja); *kedua*, upah gaji di bawah standar minimum; *ketiga*, mentalitas, kreatifitas, dan produktivitas kerja rendah; *keempat*, ketiadaan aset, misalnya pada bidang pertanian, petani tidak memiliki lahan atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah lahan pertanian; *kelima*, diskriminasi, misalnya diskriminasi karena jenis kelamin dan kelas sosial masyarakat; *keenam*, tekanan harga (biasanya berlangsung pada petani kecil atau pengrajin dalam industri rumah tangga), tekanan harga berlangsung karena mekanisme permintaan dan penawaran bebas, karena seringkali ditetapkan oleh pihak pembelinya, juga karena krisis ekonomi; dan *ketujuh*, penjualan tanah (tanah yang potensi untuk masa depan kehidupan keluarga telah habis dijual).

Untuk itu, maka dalam rangka memutuskan lingkaran rantai penyebab kemiskinan ini tidak bisa hanya diputus salah satu dari sekian banyak aspek saja, melainkan harus semuanya diputuskan atau setidaknya semua rantai yang ada dijadikan telaah dan selanjutnya dijadikan sasaran dan tujuan antar-lingkup manajemen program. Kemiskinan akan terentaskan jika program diarahkan untuk memberikan stimulasi bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

cara yang paling populer saat ini untuk mengentaskan kemiskinan adalah memang dengan melakukan pendekatan pemberdayaan. Namun, hal ini juga perlu dicermati secara kritis karena faktor penyebab ketidakberhasilan kemiskinan bukan hanya karena faktor-faktor di atas, tetapi juga karena belum terciptanya keadilan dalam proses pemberdayaan itu sendiri.

Hadirin yang saya hormati,

Sebenarnya, upaya pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat mulai diperkenalkan kepada pemerintah Orde Baru semenjak tahun 1990-an. Dimana ketika itu, pemerintah Orde Baru diperkenalkan pada paradigma baru yang lebih *humanize*, yakni paradigma *human development* atau *people centered development* untuk menggantikan paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*growth centered development*). Paradigma tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Individu dan masyarakat dianggap sebagai *human capital* dan *social capital* (Hasbullah, 2006).

Bertolak dari situ juga maka pemerintah di era Reformasi mulai mencanangkan program-program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah *credo* baru pembangunan saat ini dalam mengentasi kemiskinan masyarakat bahkan dalam segenap sektor kehidupan.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai *suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya*. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan/langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan menuju pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar, dan kecakapan-keterampilan yang baik. Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata ‘memperoleh’ mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi, atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan. Adapun makna "pemberian" menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kekuatan/kemampuan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lainnya (Sulistiyani, 2004: 77).

Pemaknaan di atas jika kita mau simpulkan maka konsep pemberdayaan masyarakat mencakup tiga hal penting yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian (*self reliant*). Itu berarti bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan mencapai kemandirian. Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat, termasuk masyarakat miskin pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka sering tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali, dan kemudian dikembangkan.

Jika asumsi ini benar maka pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat sama artinya dengan upaya terpadu untuk menanamkan kekuatan tambahan (kemampuan lebih) kepada masyarakat miskin, baik pemberdayaan pada aspek sosial ekonomi, aspek material dan fisik, aspek intelektual sumber daya, dan sampai pada aspek manajerial/pengelolaannya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Namun, harus disadari juga bahwa upaya pemberdayaan jangan sampai menjebak masyarakat miskin dalam perangkap ketergantungan, tetapi suatu upaya untuk menjadikan masyarakat miskin menjadi mandiri. Mandiri dalam pengertian bahwa *masyarakat miskin mampu untuk merencanakan program, mengelola dana, dan melaksanakan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri.*

Pada titik ini proses pemberdayaan menjadi sesuatu yang krusial dan berat. Karena membuat masyarakat miskin menjadi mandiri tidaklah semudah

membalikkan telapak tangan. Proses ini akan bertahap (*gradual*), sistematis (*systemic*), konsisten (*consistent*), dan membutuhkan waktu yang lama dan/atau terus menerus (*sustainable*). Mengapa? Karena hal ini berkaitan dengan kemampuan nyata kelompok masyarakat miskin itu sendiri.

Barangkali benar bahwa mereka mempunyai pengetahuan ataupun daya tertentu, bahkan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk merancang segala kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang dihadapi dengan *resources* yang mereka miliki. Tetapi dalam kenyataannya mereka sesungguhnya tidak sependai yang kita bayangkan. Masyarakat miskin masih "terninabobokan" oleh kemurahan hati dari pemerintah bahkan "terbelenggu" oleh perilaku-perilaku penguasa atau rezim sebelumnya, yang menerapkan praktek politik yang lazim disebut sebagai "*carrot dan stick*", artinya memberi insentif sambil menekan siapa saja yang dianggap membahayakan posisi penguasa. Implikasi praktek tersebut adalah potensi lapisan masyarakat miskin tidak pernah berkembang bahkan terkungkung, karena mereka terbiasa menunggu kemurahan tangan penguasa atau yang memiliki uang, dan pengetahuan mereka juga menjadi tumpul sehingga tidak mudah diajak untuk mengembangkan gagasan-gagasan segar dari dalam dirinya. Konsekuensinya, untuk bisa membuat masyarakat menjadi berdaya maka peran aktor utama pemberdaya, pemerintah dalam hal ini, menjadi hal yang penting.

Pendekatan pemberdayaan, hal khusus yang perlu mendapat perhatian tentang pemberdayaan adalah bahwa pemberdayaan bukan berarti pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan *charity* yang menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, tetapi lebih dari itu, kebijakan yang bisa membuat masyarakat berdaya yang menuju pada proses kemandirian, baik kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Atas dasar itu, pemerintah sebagai aktor pemberdaya harusnya memberdayakan masyarakat dalam aspek kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik. *Aspek kognitif*, pada hakekatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan individu/masyarakat dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. *Aspek konatif*, merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan itu sendiri. *Aspek afektif*, merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Sedangkan *aspek psikomotorik*, merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Untuk memudahkan pemahaman tersebut, pada tabel 1 dipaparkan contoh kondisi aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif dengan treatmentnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 1.
Model Treatment untuk Meningkatkan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif Masyarakat

Afeksi		Kognitif		Psikomotorik		Konatif	
Sangat rendah	Penyuluhan untuk penyadaran	Tidak berpengetahuan	Pembelajaran untuk pembukaan wawasan	<i>Unskilled</i>	Pelatihan untuk keterampilan dasar	Perilaku acuh tak acuh	Keteladanan perilaku agen pemberdaya (pemerintah)
Rendah	Mobilisasi pada program	Pengetahuan rendah	Pembelajaran untuk peningkatan	<i>Semiskilled</i> (setengah terampil)	Pelatihan lanjutan	Bersedia ikut serta	Motivasi menjadi obyek
Cukup	Motivasi untuk berperan	Cukup	<i>Pilot project</i>	<i>Skilled</i> (terampil)	Percobaan/uji coba-uji coba	Inisiatif untuk berperan	Pilihan-pilihan peran utama
Relatif tinggi	<i>Supporting</i> program	Relatif tinggi	Peluang bagi pemikiran inovatif	Sangat terampil	Peluang berkarya inovatif	Berperan mandiri	Perilaku fasilitasi

Sumber: Sulistiyani (2004:86).

Catatan, bahwa treatment yang diberikan harus memperhatikan kondisi masyarakat yang riil karena pola kejadian atau kasus yang dialami masyarakat tidak selalu berbanding lurus mengikuti tahapan sebagaimana digambarkan di atas. Contohnya mungkin suatu masyarakat kondisi afeksinya rendah atau pemalas tetapi kondisi psikomotorik atau skillnya bagus, maka kesadaran afeksinya yang harus diintervensi melalui penyuluhan atau motivasi, dan sebagainya.

Secara umum upaya pemberdayaan masyarakat yang diperankan oleh pemerintah dan aktor-aktor pemberdaya lainnya harus bertujuan untuk memungkinkan masyarakat untuk mewujudkan *authenticitas, being for it self*, dimana pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan kultural berada di tangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Burkey (1988) upaya pemberdayaan masyarakat harus mencakup empat dimensi utama, yaitu: *pertama*, dari segi/dimensi kemanusiaan (*human*). Pemberdayaan harus berawal dari diri anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri. *Human empowerment*, dalam hal ini merupakan suatu proses dengan mana anggota masyarakat dan masyarakat itu sendiri dapat mengembangkan rasa harga diri (*self respect*), rasa

percaya diri (*self confident*), mandiri (*self reliant*), mampu bekerja sama dan bersikap toleran terhadap adanya perbedaan dengan orang lain.

Kedua, dimensi ekonomi. Pemberdayaan menyangkut suatu proses dengan mana masyarakat melalui usahanya sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain mampu meningkatkan produksinya baik untuk konsumsinya sendiri maupun untuk bertransaksi dengan orang lain. Hal ini menuntut kemampuan untuk menganalisis problema yang dihadapi, mengidentifikasi faktor penyebab, menentukan skala prioritas, dan mengembangkan pengetahuan baru.

Ketiga, dalam dimensi politik. Pemberdayaan menyangkut proses peningkatan kesadaran akan kemampuan mereka, akan hak dan kewajibannya dan mampu menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk: (i) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal, (ii) membagi kekuasaan secara demokratis, serta (iii) mengalokasikan berbagai sumber-sumber komunal secara adil.

Keempat, dalam dimensi sosial. Pemberdayaan menyangkut peningkatan kesadaran akan kemampuan mereka dan akan kepentingan mereka bersama, dan menggunakan pengetahuannya untuk mengidentifikasikan aspirasi dan kepentingannya, mengambil keputusan bagaimana mengaktualisasikan kepentingan, mengorganisasikan diri mereka dengan bekerjasama dengan anggota masyarakat yang lain, dan memobilisasi sumber daya dan sumber alam mereka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi anggota masyarakat, di dalam konfigurasi kultur dan sistem politik yang ada.

Pendapat lain dikemukakan oleh Moeljarto Tjokrowinoto dalam Ujan (2011:37) bahwa pemberdayaan yang merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan itu memiliki tujuan penting, yakni: *pertama*, menekankan perasaan ketidakberdayaan (*impotensi*) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik di mana orang miskin itu tinggal; *kedua*, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya untuk memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Hindari rencana atau kegiatan eksploitatif selama proses pemberdayaan berlangsung (artinya, biarkan kesadaran kritis orang miskin muncul dan biarkan pula melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya); *ketiga*, tanamkan rasa persamaan (*egalitarian*) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial; *keempat*, merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh (ini hanya bisa

tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan dengan kelompok-kelompok dan *person-person* strategis dalam masyarakat miskin tidak mengalami distorsi); *kelima*, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin (seperti perencanaan hidup, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitas kerja); dan *keenam*, distribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Untuk maksud-maksud di atas, secara gradual pemerintah sekarang harus memposisikan diri sebagai *dinamisator*, kemudian beranjak dengan melakukan pergeseran secara rasional menuju pada peran *katalisator* dan secara berangsur-angsur berperan menjadi *fasilitator*. Dengan begitu secara perlahan dan terencana masyarakat akan berkembang dan memiliki kompetensi yang memadai dan berangsur-angsur pula terjadi pendelegasian kewenangan serta terbentuk kemampuan kontrol dan kemampuan diri dalam pelaksanaan pembangunan guna mengentasi kemiskinan yang dihadapi.

Gambaran ideal pendekatan pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan di atas boleh jadi secara teoritis dan konseptual memungkinkan untuk terjadi, tetapi dalam prakteknya tidak berjalan mulus seperti yang dikonseptualisasikan atau yang diteoritisasikan. Selalu saja ada persoalan yang dihadapi ketika proses pemberdayaan itu dilaksanakan, selain yang disebabkan oleh faktor dari masyarakat miskin, penyebab yang lain adalah dari aktor pemberdaya itu sendiri yang kurang memiliki kapasitas atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki untuk proses pemberdayaan secara utuh.

Keterbatasan itu antara lain keterbatasan kemampuan intelektual, keterbatasan memahami filosofi pemberdayaan, keterbatasan kemampuan material, dan keterbatasan pada aspek mental dan sikap. Untuk poin yang terakhir ini, misalnya, para pelaku utama pemberdaya bekerja karena secara kebetulan berada pada posisi jabatan tertentu, seperti sebagai pimpinan program atau proyek pemberdayaan, sehingga keberpihakan pada misi pemberdayaan tidak lebih dari sekedar "proyek" yang lebih mengedepankan konsep. Dikatakan demikian karena dalam proses implementasinya acapkali keberpihakan berbalik kepada dirinya sendiri atau kelompok tertentu di luar sebutan masyarakat atau kelompok miskin yang diberdaya. Konsep-konsep yang baik yang dibuat, hanya sebagai simbol kepentingan administrasi agar semua pihak yang membaca terenyuh, simpatik, dan memberikan dukungan.

Hadirin yang saya hormati,

Banyak pihak melakukan refleksi terhadap ketidakberhasilan program pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini, seperti dikemukakan

oleh Jamasy (2014), karena para pelaku utama pemberdaya kurang dan tidak mempedulikan amanat untuk berlaku adil dalam prosedural, proses pendistribusian hak, serta tidak berkomitmen dalam berperilaku etis. Hal tersebut dapat menyebabkan seperti yang dapat kita lihat sekarang ini yaitu mereka atau para pelaku utama pemberdaya lebih cenderung mengutamakan kepentingan administrasi daripada mengutamakan proses dengan segala tuntutananya.

Apabila kondisi seperti itu terus berlangsung dalam program-program pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa program pemberdayaan nasional yang dicanangkan pemerintah saat ini akan mengalami kegagalan terus dan pengentasan kemiskinan hanya merupakan utopia belaka. Karena pemberdayaan secara utuh harus dimulai dari pelaku utamanya, dan tidak hanya terarah pada mereka yang diberdayakan saja. Untuk itu, menurut Bob Tilden dalam Jamasy (2014: 57) tenaga pemberdaya harus memiliki empat sifat utama, yakni: *problem solving* (terampil memecahkan masalah), *sense of community* (peduli dan punya keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat miskin), *sense of mission* (peduli dan punya keberpihakan untuk mengikuti misi pemberdayaan), dan *honesty with others and with self* (jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai akhir sekaligus pelajaran (*Lessons Learned*) dari pidato (orasi ilmiah) pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang nyata dan perlu dientaskan, jika tidak menghendaki menurunnya derajat hidup masyarakat Indonesia. Upaya pengentasannya harus dimulai dengan melihat fenomena kemiskinan dalam masyarakat itu sebagai sesuatu yang kompleks yang telah terjadi dalam dimensi waktu yang lama. Bukan hanya sekedar fenomena sesaat dan akibat dari persoalan ekonomi semata.

Pengidentifikasian yang komprehensif dan tepat terhadap proses kemiskinan dalam masyarakat harus dilakukan, sebelum upaya atau langkah strategis dilakukan. Karena tanpa itu maka apapun upaya dilakukan tidak akan memecahkan akar persoalan dan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Dewasa ini, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengentasi kemiskinan dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dalam masyarakat. Namun penerapan pendekatan ini, perlu pula diawasi secara seksama dan kritis, terutama terhadap para pelaku pemberdaya. Karena diakui oleh banyak kalangan bahwa pelaku pemberdaya ini juga menjadi

sumber ketidakberhasilan dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik yang peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini, perlu selalu "awas" terhadap praktek pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, sehingga kontrol terus berjalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi para pelaku pemberdaya harus lebih awal menghayati filosofi pendekatan pemberdayaan, memiliki kapasitas yang memadai tentang substansi pemberdayaan, dan memiliki komitmen pada penerapan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam praktek pemberdayaan kepada masyarakat (jangan cenderung mengutamakan kepentingan administrasi daripada mengutamakan proses dengan segala tuntutan). Demikian juga bagi masyarakat miskin, harus sadar dan berusaha bangkit dari ketidakberdayaan yang dialami dan melihat bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir semata, tetapi hanya merupakan konstruksi sosial. Dengan demikian, maka upaya pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang menjadi strategi unggulan akan berdampak positif (berhasil) kepada menurunnya angka kemiskinan di negeri ini.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup dari pidato (orasi ilmiah) pada hari ini, kami ingin mengajak khususnya kepada lembaga STIA "AAN" untuk:

1. Hendaknya STIA "AAN" sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini ikut andil dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap praktek pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, sehingga kontrol terus berjalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat dilakukan secara praktis dengan mengawasi dan memberi masukan terhadap praktek pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh para pelaku pemberdaya maupun pemerintah agar jangan melulu melihat fenomena kemiskinan dalam masyarakat saat ini sebagai sesuatu fenomena sesaat dan akibat dari persoalan ekonomi semata (persoalan materi atau modal saja), melainkan merupakan gabungan dari kemiskinan yang disebabkan oleh beragam aspek (sosial, budaya, dan politik), bahkan mengarah pada persoalan hak dan ketidakadilan.
2. Hendaknya STIA "AAN" sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini ikut andil dalam menekan dan

menyadarkan para pelaku pemberdaya agar lebih menghayati filosofi pendekatan pemberdayaan, memiliki kapasitas yang memadai tentang substansi pemberdayaan, dan memiliki komitmen pada penerapan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam praktek pemberdayaan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan secara praktis dengan menekan dan menyadarkan pada para pelaku pemberdaya agar jangan cenderung mengutamakan kepentingan administrasi daripada mengutamakan proses pelaksanaan pemberdayaan dengan segala tuntutan.

3. Hendaknya STIA “AAN” sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini ikut andil dalam menekan pemerintah agar selalu konsisten untuk melakukan proses *monitoring* dan evaluasi atas berbagai program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan proses *monitoring* dan evaluasi atas berbagai program pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini telah terhenti.
4. Hendaknya STIA “AAN” sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini ikut andil dalam menekan pemerintah agar mempertahankan dan jangan mengurangi program-program pemberdayaan yang telah ada. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sekarang mulai mengurangi program-program pemberdayaan yang telah ada sebelumnya. Bila perlu STIA “AAN” dapat menekan pemerintah agar menambah program-program pemberdayaan masyarakat yang baru, disamping program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya.
5. Hendaknya STIA “AAN” sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini ikut andil dalam menyadarkan dan memotivasi masyarakat miskin agar selalu berusaha bangkit dari ketidakberdayaan yang dialami dan melihat bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir semata, tetapi hanya merupakan konstruksi sosial.
6. Hendaknya STIA “AAN” sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini menjadi *leader* yang pertama untuk perguruan tinggi yang mempunyai **pusat studi pemberdayaan masyarakat**. Di Indonesia belum ada pusat studi ini pada tingkat Perguruan Tinggi, dan bisa menjadi unggulan dan *partner* bagi lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam hal **pemberdayaan masyarakat**. Disamping itu,

dapat meningkatkan *brand* institusi kita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan mahasiswa.

7. Hendaknya STIA "AAN" sebagai kampus/ perguruan tinggi yang bergerak pada ilmu-ilmu sektor publik serta peduli pada masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini memperbanyak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia selama ini, masih sedikitnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan tentang pemberdayaan masyarakat, baik itu yang berasal dari dosen, mahasiswa, maupun pihak lain. Apalagi yang berasal dari kampus kita.

Untuk mengaktualisasikan ajakan kami tersebut diatas tentunya tidak bisa dikontribusikan serta dipikirkan oleh salah satu pihak atau segelintir orang saja di internal kampus/ perguruan tinggi kita. Oleh karena itu, agar pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia bisa lebih baik kedepannya, berbagai kontribusi serta pemikiran seluruh civitas akademika STIA "AAN" sangat diharapkan. Selamat peduli, andil, dan berkarya. Selamat sore.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Mohammad Kus Yunanto, S.I.P., MPA

DAFTAR PUSTAKA

- Burkey, Stan. 1988. *People first: A Guide to Self Reliant, Participatory Rural Development*. London & New York: Zed Books.
- Dewanta, S., Awan, dkk (ed). 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR United Press.
- Jamasy, Owin. 2014. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M. dan Usma Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi dan politik Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Sunartiningsih, Agnes (ed). 2004. *Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Institusi lokal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ujan, Andre Ata. 2011. *Keadilan dan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.

UNDP. 2010. *Human Development Report 2010*. New York: Oxford University Press.

Wirutomo, Paulus. 2007. "Teori Sosial Pembangunan", *Bahan Kuliah*. Universitas Indonesia, 3 September 2007.

Sumber Lain:

www.investor.co.id/pages/index/m-index.php

BPS. 2016. *Berita Resmi Statistik BPS Tahun 2004-2016*.